

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA JARIMAH MENJUAL DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS (*KHAMAR*) DALAM PERSPEKTIF QANUN HUKUM ACARA JINAYAT

(Studi Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)

*Diajukan Untuk Memperoleh Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

TEKU ANANTA DESKY

2010111010

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Prof. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg : 15/PK-IV/V/2024

ABSTRAK

Disparitas adalah perbedaan hukuman yang diberikan majelis hakim terhadap tindak pidana yang sejenis. Perbedaan hukuman yang terjadi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe yang ditetapkan yakni terdapat di perkara Nomor 10/JN/2018/MS.Lsm terdakwa dihukum 20 kali cambuk, perkara Nomor 9/JN/2018/MS.Lsm 25 kali cambuk, dan perkara Nomor 1/JN/2020/MS.Lsm dihukum 25 gram emas murni. Ketiga perkara tersebut sama-sama didakwa menggunakan Pasal 16 Ayat (1) tentang Qanun Aceh No 6 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*) 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dalam penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*) dan 3. Bagaimanakah Pembuktian Dalam penerapan hukuman cambuk terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*). Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen dan wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengungkapkan data primer dan data sekunder yang digambarkan mengenai kondisi objektif dan permasalahannya kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada. Hasil Penelitian ini menjelaskan Bagaimana penerapan sanksi oleh hakim dalam memutuskan jarimah menjual dan menyimpan minuman keras di Kota Lhokseumawe berdasarkan aturan dan normanya, ketentuan sanksinya, dan Pembuktiannya. Majelis hakim mempertimbangkan putusan terkait jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*) dan menunjukkan bahwa Disparitas terhadap putusan Nomor 10/JN/2018/MS.Lsm, perkara Nomor 9/JN/2018/MS.Lsm, dan perkara Nomor 1/JN/2020/MS.Lsm, disebabkan Qanun aceh hukum Jinayat hanya memberikan batas maksimum Sanksi kepada jarimah, yang berarti sanksinya bersifat tidak pasti, Sehingga Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jarimah tidak selalu seragam, dan juga disebabkan latar belakang pelaku, dan interpretasi hakim terhadap Qanun Jinayah Aceh. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan dalam musyawarah majelis hakim sebelum memutuskan perkara. Penilaian hakim harus objektif, mempertimbangkan semua bukti termasuk saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya, berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan. Pembuktian dalam perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki banyak kesamaan dengan pembuktian dalam perkara pidana di peradilan umum. Namun, ada perbedaan yang terletak pada jenis dan kriteria alat bukti yang digunakan. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur secara spesifik alat-alat bukti yang sah dan kriteria penggunaannya.

Kata Kunci: Qanun Jinayah, Khamar, Mahkamah Syariah Lhokseumawe.